

AKIBAT-AKIBAT DARI TERLAMBATNYA PROSES PEMBAHARUAN PENDIDIKAN  
DI INDONESIA

A.H.W. PRANARKA

Apabila peringatan hari pendidikan nasional ini disambut dengan judul pemikiran di atas, bukanlah maksud kami untuk mendramatisir situasi pendidikan di negara kita dewasa ini. Adalah menjadi maksud kami untuk mengajak melihat adanya kemungkinan riil di atas dan mengajak mengadakan sedikit analisa mengenai akibat-akibat yang dapat timbul dari kenyataan itu. Masalahnya adalah cukup penting untuk diperhatikan.

Kita kiranya harus cukup realistis dalam meninjau dunia pendidikan di negara kita ini. Pendidikan merupakan satu medan di mana bertemu tegangan antara harapan dan kekhawatiran. Adalah satu kenyataan bahwa kita menginginkan terjadinya proses pembaharuan pendidikan. Akan tetapi adalah kenyataan juga bahwa kita melihat proses tersebut semakin menjadi melamban dan bahkan semakin terasa kurang jelas dan momentu. Kita beralih dari suasana akselerasi (percepatan pembaharuan) ke dalam suasana retardasi (pelambanan pembaharuan). Hal ini dapat dilihat dari perbandingan yang kita adakan di dalam persuratkabaran, di lingkungan departemen dan di lingkungan masyarakat luas umumnya.

Sesungguhnya proses pelambanan itu sudah terjadi menjelang tahun-tahun terakhir dari PELITA I. Menang tahapan pertama dari periode PELITA I telah dapat meletakkan garis-garis besar politik pendidikan di negara ini, akan tetapi sesudahnya harus melangkah lebih maju memasuki perencanaan yang lebih detail, terjadilah proses pelambanan tersebut.

Bila kita adakan analisa, maka ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya proses pelambanan itu. Misalnya saja: (1) adanya dilema-dilema yang belum terpecahkan dalam tahap formulasi dari politik pendidikan. (2) Adanya kontroversi dan konflik-konflik baik yang berlatar belakang politis, ideologis maupun akademis, yang menjadi berlarut-larut. (3) Adanya infrastruktur pendidikan yang semakin merapuh, antara lain sistim

manajemen pendidikan, keadaan guru dan administrator pendidikan yang kurang memadai. (4) Terjadinya proses informasi yang meluas mengenai pembaharuan pendidikan akan tetapi tidak disertai dengan proses persepsi mengenai masalah pendidikan itu sendiri. (5) Masyarakat kita, untuk sungguh-sungguh berkambang maju, ternyata memerlukan proses pedagogis (atau proses agogis) yang cukup radikal dalam beberapa aspek.

Yang kami namakan sebagai dilema-dilema di dalam formulasi konsepsional politik pendidikan di negara ini misalnya saja antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif; antara pendekatan ekonomis dan pendekatan non-ekonomis. Dilema-dilema tersebut ternyata berkait juga dengan formulasi konsepsional tentang pembangunan masyarakat Indonesia ini sendiri. Tentang kontroversi politik ataupun ideologis kiranya sangat jelas.

Sejak lama sudah terjadi bahwa medan pendidikan di negara ini juga menjadi medan konflik-konflik politik, konflik-konflik ideologis. Tetapi pada akhir-akhir ini terdapat tipe kontroversi lain, ialah kontroversi akademis, khususnya dalam usaha merencanakan pola pendidikan itu. Hal ini tentulah sangat dapat menghasilkan buah-buah perkembangan. Akan tetapi sementara itu terjadi bahaya bahwa masalah pendidikan tidak lagi menjadi masalah gerakan pembaharuan sosial di masyarakat ini melainkan semata-mata tinggal menjadi masalah diskusi-diskusi. Tentang hambatan-hambatan lain kiranya tidak perlu diuraikan panjang lebar pada kesempatan ini. Tetapi satu catatan adalah sangat penting ialah bahwa untuk proses pembangunan sosial, masyarakat kita memerlukan adanya satu strategi pendidikan yang radikal. Salah satu kunci dari berhasilnya proses pembangunan adalah terjadinya proses *the will to develop* di dalam masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk *subjective will* maupun dalam suasana *collective will*. Hal ini yang harus kita perhatikan. Dan melotakkan *the will to develop* tersebut, kiranya itulah fungsi utama dari pendidikan, sementara sesudah itu dilongkapi-lah dengan pembinaan nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan, serta kemampuan mengadakan komunikasi baik sosial maupun ekologis, sehingga manusia-manusia mampu membudayakan masyarakat dan alamnya.

Memang atas dasar pertimbangan tersebut telah dirumuskan beberapa kerangka pokok dalam politik pendidikan di Indonesia, seperti misalnya: perlunya satu manajemen pendidikan nasional; dan perlunya sistem pendidikan yang diintegrasikan dengan

pembangunan. Tetapi rumusan tersebut belum membawa proses yang secara lebih jelas menunjukkan arah maupun pola politik pendidikan di negara ini.

Apakah akibat-akibat yang bakal terjadi bila proses keterlambatan ini tidak teratasi? Kita semua tahu bahwa politik pembaharuan pendidikan ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada di dalam perkembangan sejarah bangsa dan masyarakat kita ini. Hal ini mungkin akan lebih menjadi jelas apabila politik pembaharuan pendidikan ini kita tempatkan dalam konteks Orde Baru.

Orde Baru sebagai satu gerak yang ingin mengadakan pembaharuan dan pembangunan di masyarakat ini, dengan sendirinya pasti harus berhadapan dengan masalah pendidikan. Sebab pada akhirnya Orde Baru adalah "Perubahan sikap mental, cara berpikir dan cara kerja", demikianlah ditegaskan oleh Presiden Soeharto. Dan tepatlah formulasi itu. Terutama karena pada akhirnya berhasil tidaknya Orde Baru dan segala cita-citanya itu tergantung pada faktor manusia Indonesia, penduduk Indonesia, rakyat Indonesia. Manusia adalah selalu merupakan kekuatan yang strategis di dalam proses pembaharuan dan pembangunan sosial. Dengan berdasarkan kenyataan ini maka jelas bahwa politik pendidikan harus memperhatikan segi relevansinya (mewujudkan sistem pendidikan yang membuat manusia menjadi kekuatan strategis dalam pembangunan dan tuntutan perkembangan), memperhatikan segi kualitatif (mengenbangkan di dalam manusia Indonesia kualitas-kualitas yang diperlukan guna perkembangannya), memperhatikan segi kuantitatif (supaya sebanyak dan semerata mungkin manusia-manusia Indonesia menjadi kekuatan strategis yang riil), dan memperhatikan segi efektifitas maupun efisiensi (terutama mengingat sumber-sumber yang terbatas sementara jumlah penduduk berkembang dan tuntutan perkembangan sosial baik secara nasional, regional maupun internasional semakin besar dan semakin mendesak).

Dengan demikian jelas bahwa apabila terjadi keterlambatan di dalam gerak politik pembaharuan pendidikan, maka hal tersebut membawa serta akibat-akibat di dalam keterlambatan proses Orde Baru, proses pembaharuan dan pembangunan masyarakat Indonesia.

Hal tersebut adalah sangat gawat nantinya. Perlu dikemukakan satu kenyataan bahwa dengan memasuki tahap perencanaan teknokratis dari pembangunan sosial, maka tidak jarang orang

menjadi semakin lepas dari konteks dasar-dasar pembaharuan dan arah perjuangan masyarakat. Dalam hal ini lepas dari konteks dasar pembaharuan dan pembangunan Indonesia ini, yang adalah Konstitusi dan Pancasila. Semakin kita masuk ke dalam diskusi-diskusi akademis, semakin ada bahaya terjauh dari konteks dasar tersebut, dengan akibat bahwa politik pendidikan dan perencanaan pendidikan juga menjadi semakin menjauh dan melapas dari konteks dasar itu. Akibatnya adalah jelas: karena pendidikan langsung berkenaan dengan pembinaan manusia, maka dapat terjadilah satu bahaya semakin melapasnya manusia Indonesia ini dari konteks cita-cita dasarnya yakni cita-cita Pancasila dan UUD 45.

Soal lain lagi perlu dicatat adalah masalah pentingnya pendidikan luar sekolah. Memang politik pendidikan dewasa ini telah menggariskan untuk menerima satu konsep pendidikan yang luas. Pendidikan tidak diindentifikasikan dengan sekolah. Maka pendidikan disalurkan melowati medan sekolah dan medan pendidikan luar sekolah. Hal ini memang sangat tepat, terutama karena pendidikan harus bergerak dalam pembinaan potensi manusia. Yang terpenting sekarang ialah ditemukannya cara-cara melaksanakan sistim pendidikan tersebut. Dapat dikatakan bahwa konsep pendidikan tersebut sangat berdekatan dengan konsep kepemimpinan. Itulah sebabnya maka bukan lagi konsep pedagogi melainkan konsep agogi (pedagogi berarti memimpin anak-anak; agogi berarti memimpin semuanya). Hal ini membawa implikasi bahwa pola kepemimpinan di masyarakat kita harus juga menjadi pola yang edukatif. Ini berarti bahwa para pemimpin di dalam masyarakat ini benar-benar merupakan pembudayaan dari sikap, nilai, serta segala perlengkapan manusia Indonesia untuk mengembangkan diri dan masyarakatnya. Kiranya bila hal ini terjadi, maka sungguh-sungguhlah dapat terjadi satu proses akselerasi. Akan tetapi ini membawa implikasi bahwa di kalangan para pemimpin itu sendiri perlu terjadi satu proses pendidikan. Keterlambatan di dalam proses pembaharuan pendidikan dengan demikian juga dapat membawa akibat pada kenyataan ini: di samping masyarakat kurang cepat disiapkan untuk berubah diri dan membangun, maka di dalam masyarakat juga kurang disiapkan pemimpin-pemimpin yang memang menghayati proses dinamisasi sosial yang diperlukan masyarakat kita untuk maju, untuk membangun. Hal ini bisa mengakibatkan lingkaran setan antara masalah proses pembaharuan dan pembangunan dari atas atau dari bawah.

Selanjutnya kita tentu saja akan dapat melihat akibat-akibat lainnya lagi. Misalnya saja akibat terlambatnya perencanaan dan pengembangan tenaga kerja.

Kelambanan-kelambanan di dalam usaha mengembangkan tenaga-tenaga kerja ini, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, tentu saja secara langsung perhatian ditujukan pada pemecahan strategi mikro. Dan sehubungan dengan ini maka konstruksi kurikulum adalah sangat penting.

Adalah sangat simbolis bahwa hari pendidikan nasional ini segera akan disusul dengan hari kebangkitan nasional. Sejarah nasional kita menunjukkan bahwa proses kemerdekaan nasional Indonesia ini tercapai melalui proses kebangkitan nasional yang lahir dari proses pendidikan. Dan terjadilah di dalam proses itu satu triadis: Pendidikan - Kebangkitan Nasional - Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan adalah tugas kita sekarang melanjutkan proses tersebut dengan menyusun satu triadis baru: Kemerdekaan Republik Indonesia - Pendidikan - Kemajuan-kemajuan ke arah perwujudan satu Indonesia baru: Indonesia yang lebih bersatu, lebih bekerja, lebih membangun, lebih maju dan lebih sejahtera.

